

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam mewujudkan kemajuan pendidikan mengeluarkan program bantuan beasiswa Bidikmisi, yaitu program bantuan pendidikan/beasiswa melalui Kementerian Pendidikan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang ditujukan bagi siswa-siswi berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi namun kurang mampu, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan memutus rantai kemiskinan. Agar program tersebut berhasil maka memerlukan kesesuaian *beneficiaries* pada program.

Kesesuaian *beneficiaries* program adalah suatu program pembangunan dinyatakan berhasil ketika adanya kesesuaian antara mereka yang dibantu, program, dan organisasi yang membantu mempunyai koordinasi yang tak bisa dipisah (Korten, 1988: 241). Dengan istilah khusus, program pembangunan akan gagal memajukan kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungan erat antara: Kebutuhan-kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program; persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pelaksana; dan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima serta proses pengambilan keputusan dari organisasi pelaksana.

Program beasiswa Bidikmisi telah diatur dalam Permendikbud Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, adapun persyaratan untuk mendaftar beasiswa Bidikmisi menurut Permendikbud Nomor 96 Tahun 2014 yaitu:

- a. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan

Kepala sekolah/madrasah melaksanakan sosialisasi kepada para siswa kelas 12 khususnya yang tidak mampu untuk difasilitasi pendaftaran beasiswa Bidikmisi. Beasiswa akan diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi selama 8 (delapan) semester untuk program Diploma IV, dan Sarjana (S1), dan selama 6 (enam) semester untuk program Diploma III dengan ketentuan penerima beasiswa berstatus aktif. Dalam penjangkungannya setiap sekolah menengah atas/madrasah/sederajat memfasilitasi bagi para siswa kelas 12 dengan melampirkan fotokopi rapor semester 1 s.d. 6 semester, fotokopi ijazah, nilai akhir ujian nasional yang sudah dilegalisir kepala sekolah, dan didukung dengan surat keterangan/sertifikat prestasi sekolah sebagai nilai tambah dan surat keterangan tidak mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya untuk didaftarkan program Bidikmisi tanpa dipungut biaya. Prosedur penetapan siswa SMA/SMK/MA dianggap lolos diatur oleh pusat sehingga setiap Perguruan Tinggi hanya melakukan verifikasi secara langsung.

- b. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang lulus satu tahun sebelumnya yang tidak menerima Bidikmisi

Setiap siswa diberikan kesempatan lagi dalam kurun waktu satu tahun apabila pada tahun pada saat melakukan pendaftaran tidak terjaring pada program Bidikmisi. Dalam penjangingannya setiap sekolah menengah atas/madrasah/sederajat memfasilitasi bagi para siswa kelas 12 dengan melampirkan fotokopi rapor semester 1 s.d. 6 semester, fotokopi ijazah, nilai akhir ujian nasional yang sudah dilegalisir kepala sekolah, dan didukung dengan surat keterangan/sertifikat prestasi sekolah sebagai nilai tambah dan surat keterangan tidak mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya untuk didaftarkan program Bidikmisi tanpa dipungut biaya.

- c. Warga Negara Indonesia

Program Bidikmisi diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia dengan menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga untuk membuktikan bahwa penerima Bidikmisi adalah warga Indonesia asli.

- d. Memiliki keterbatasan ekonomi dan mempunyai potensi akademik baik yang didukung bukti dokumen yang sah

Program Bidikmisi adalah beasiswa yang khusus diberikan kepada siswa-siswa kelas 12 yang tidak mampu dan ingin melanjutkan studi pada perguruan tinggi negeri. Dengan menunjukkan bukti penerima KIP/BSM dan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal sebesar Rp 3.000.000,00 per bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga

sebesar Rp 750.000,00 setiap bulannya, dan didukung dengan surat keterangan tidak mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Para siswa juga diwajibkan memiliki riwayat nilai akhir yang baik dari sekolah berdasarkan surat rekomendasi objektif dan akurat dari kepala sekolah. Namun dalam aturan tersebut kurang secara detail persyaratan secara khususnya.

- e. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

Pelamar Bidikmisi menandatangani surat persetujuan bahwa data yang diserahkan sudah sesuai dan tidak terikat dengan instansi lain, apabila terbukti adanya ketidaksesuaian data dapat dikenakan sanksi/blacklist. Dengan catatan tambahan bahwa penerima Bidikmisi dapat menerima beasiswa lain selain sumber pendanaan dari APBN.

- f. Lulus seleksi masuk perguruan tinggi yang diadakan oleh tim seleksi nasional Sekolah mendaftarkan siswanya melalui laman/website Bidikmisi dan menyelesaikan semua tahapan yang diminta dalam sistem pendaftaran. Setelah didaftarkan pada laman Bidikmisi siswa mendaftar seleksi nasional/mandiri yang telah diperoleh sesuai ketentuan masing-masing pola seleksi melalui laman berikut:

- 1) SNMPTN melalui <http://snmptn.ac.id>
- 2) SBMPTN melalui <http://sbmptn.ac.id>
- 3) PMDK Politeknik <http://pmdk.politeknik.ac.id>
- 4) Seleksi mandiri PTN sesuai ketentuan PTN masing-masing

5) Seleksi mandiri PTS sesuai ketentuan PTS masing-masing

Setelah dinyatakan lolos seleksi maka para siswa pendaftar Bidikmisi diminta untuk melakukan pelengkapan berkas dan dibawa saat pendaftaran ulang.

Program Bidikmisi yang telah berlangsung sejak tahun 2010 merupakan program 100 hari kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan diteruskan hingga saat ini. Pada tahun 2014 Bidikmisi berada dibawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa). Bidikmisi ini merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu dan memiliki potensi akademik. Program ini sejalan dengan Nawacita pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Melaksanakan revolusi karakter bangsa, melalui pendidikan dengan memperteguh kebhinnekaan. Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal. Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya bangsa. Untuk itu, lulusan program Bidikmisi, diharapkan dapat mengisi kebutuhan sumber daya manusia Indonesia yang siap berkompetisi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Program Bidikmisi tentunya angin segar bagi para siswa yang tidak mampu yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi tiap tahunnya. Hal tersebut memberikan pintu yang lebar untuk mengakses beasiswa tersebut terhadap mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri dalam program Bidikmisi. Di Jawa Tengah terdapat dua Perguruan

Tinggi besar yakni Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Negeri Semarang (Unnes) sebagai penyelenggara beasiswa Bidikmisi. Dari sisi jumlah mahasiswa penerima Bidikmisi pada tahun 2017 melalui jalur seleksi SNMPTN ternyata Undip lebih besar daripada Unnes, yaitu Undip sebanyak 763 mahasiswa dan Unnes 550 mahasiswa.

Berikut jumlah penerima Bidikmisi berdasarkan jalur seleksi masuk Perguruan Tinggi khususnya di Universitas Diponegoro (Undip) yang terdiri dari jalur seleksi SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri, dimana jalur seleksi SNMPTN mempunyai jumlah yang tertinggi, dibandingkan jalur lainnya.

Tabel 1.1

**Jumlah Mahasiswa Penerima Bidikmisi melalui jalur seleksi
SNMPTN/SBMPTN di Universitas Diponegoro**

No	Tahun	Mahasiswa SNMPTN	Mahasiswa SBMPTN	Seleksi Mandiri	Jumlah
1	2015	916 (72.8%)	274 (21.7%)	68 (5.4%)	1258 (100%)
2	2016	879 (71%)	291 (23.5%)	80 (6.4%)	1238 (100%)
3	2017	763 (64.4%)	421 (35.5%)	116 (8.9%)	1300 (100%)

Sumber: Diolah dari Data Penerima Bidikmisi Mahasiswa Undip 2014-2017

Berdasarkan tabel diatas perolehan setiap tahunnya cenderung meningkat jika tahun 2016 mengalami peningkatan 1 persen maka pada tahun 2017 Undip memperoleh kuota sejumlah 2.5 persen dan tertinggi adalah pada tahun 2017 penerima bidikmisi di Undip mencapai 1300 siswa. Hal ini tentu menjadi tugas yang berat karena

Universitas Diponegoro dituntut untuk mengelola bidikmisi sesuai dengan prinsip yang tertuang pada pedoman penyelenggaraan bidikmisi yakni 3T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, dan Tepat Jumlah).

Undip adalah salah satu PTN yang menerima kuota mahasiswa Bidikmisi dengan kuota yang cukup banyak, terdapat berbagai daerah asal pendaftar Bidikmisi dan yang terbesar berasal dari wilayah Jawa Tengah, berikut rekapitulasi jumlah mahasiswa baru S1 Universitas Diponegoro yang menerima beasiswa Bidikmisi:

Tabel 1.3

Jumlah Mahasiswa Bidikmisi Undip berdasarkan Besaran Porsi Provinsi penerima Beasiswa Tahun 2015-2017

No	Provinsi	Bidikmisi 2015	Bidikmisi 2016	Bidikmisi 2017
1	Jawa Tengah	954 (75.83)	834 (67.36)	894 (75.50%)
2	Jawa Timur	64 (5.08%)	85 (6.86%)	51 (4.30%)
3	Jawa Barat	36 (2.86%)	47 (3.79%)	32 (2.70%)
4	Banten	15 (1.19%)	13 (1.05%)	14 (1.18%)
5	DKI Jakarta	25 (1.98%)	14 (1.13%)	15 (1.26%)
6	DIY	8 (0.63%)	7 (0.56%)	12 (1.01%)
7	NAD	-	9 (0.72%)	2 (0.16%)
8	Sumatera Utara	61 (4.84%)	117 (9.45%)	58 (4.89%)
9	Sumatera Barat	46 (3.97%)	48 (3.87%)	50 (4.22%)

10	Sumatera Selatan	5 (0.39%)	5 (0.40%)	2 (0.16%)
11	Riau	-	10 (0.80%)	9 (0.76%)
12	Bangka Belitung	-	1 (0.08%)	-
13	Jambi	5 (0.39%)	11 (0.96%)	6 (0.50%)
14	Bengkulu	-	2 (0.16%)	1 (0.08%)
15	Kepulauan Riau	5 (0.39%)	3 (0.26%)	-
16	Lampung	17 (1.35%)	17 (1.37%)	16 (1.35%)
17	Bali	-	2 (0.16%)	2 (0.16%)
18	NTT	-	-	-
19	NTB	6 (0.47)	6 (0.48%)	8 (0.67%)
20	Kalimantan Utara	-	-	1 (0.08%)
21	Kalimantan Timur	3 (0.23)	4 (0.32%)	-
22	Kalimantan Tengah	1 (0.07)	2 (0.16%)	2 (0.16%)
23	Kalimantan Selatan	-	1 (0.08%)	1 (0.08%)
25	Kalimantan Barat	2 (0.15)	4 (0.32%)	-
26	Sulawesi Selatan	3 (0.23)	6 (0.48%)	3 (0.25%)
27	Sulawesi Tenggara	-	1 (0.08)	-
28	Sulawesi Tengah	-	-	1 (0.08%)
29	Sulawesi Barat	-	-	-
30	Sulawesi Utara	1 (0.07%)	1 (0.08%)	-

31	Gorontalo		1 (0.08%)	4 (0.33%)
32	Maluku Utara	-	-	-
33	Maluku	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-
35	Papua	1 (0.1%)	-	-
Jumlah		1258 (100%)	1238 (100%)	1184 (100)

Sumber: Diolah dari Data Bidikmisi Mahasiswa Undip 2014-2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerima beasiswa Bidikmisi di Undip sebagian besar berasal dari Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2017 sebanyak 75.50 persen namun jumlah ini cenderung kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dilihat dari klasifikasi sekolah yang menerima Bidikmisi, ternyata dari tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagian besar dari SMA Negeri. Berikut tabel yang memperlihatkan secara rinci jumlah mahasiswa yang menerima Bidikmisi berdasarkan klasifikasi sekolah.

Tabel 1.2

**Klasifikasi Sekolah Di Jawa Tengah Penerima Program Bidikmisi di Undip
Tahun 2015-2017**

No	Tahun	SMA Negeri	SMA Swasta	SMK Negeri	SMK Swasta	MA	MA Swasta	Jumlah
1	2015	842 (87%)	36 (3.7%)	16 (1.6%)	3 (0.3%)	59 (6%)	11 (1%)	967 (100%)
2	2016	720 (84.5%)	52 (6%)	27 (3%)	3 (0.4%)	24 (2.8%)	26 (3%)	852 (100%)
3	2017	713 (60.2%)	54 (4.5%)	18 (1.5%)	1 (0.08)	99 (8.3%)	44 (3.7%)	1184 (100%)

Sumber: Diolah dari Data Penetapan Mahasiswa Undip Tahun 2014-2017

Universitas Diponegoro setiap tahunnya menerima mahasiswa baru bagi penerima program Bidikmisi. Rata-rata penerima Bidikmisi berasal dari sekolah setingkat SMA dan sebagian besar siswa pendaftar berasal dari daerah Jawa Tengah (Universitas Diponegoro, 2017). Jumlah anak SMA dan MA lebih besar dibandingkan dengan SMK dikarenakan anak SMK lebih memilih untuk melanjutkan ke dunia kerja. Penerapan dari peraturan persyaratan Bidikmisi seharusnya membuka akses pendidikan kepada siswa-siswi yang berasal dari SMA/Sederajat terutama tidak mampu, dan perlu adanya pemerataan penerima jika dilihat dari tabel maka perolehan SMA Negeri jumlahnya terlalu besar dibandingkan dengan sekolah yang lain.

Untuk menjamin keberlangsungan studi mahasiswa program Bidikmisi terdiri dari beberapa komponen diantaranya:

- a. Bantuan biaya penyelenggara pendidikan
- b. Bantuan biaya hidup
- c. Biaya resetlemen Bidikmisi/biaya pengelolaan Bidikmisi.

Pengawasan dalam menjalankan program Bidikmisi dilakukan oleh Perguruan Tinggi dengan cara melakukan verifikasi terhadap calon penerima Bidikmisi setelah dinyatakan lolos seleksi penerimaan perguruan tinggi.

Menurut Pedoman beasiswa Bidikmisi ada beberapa kriteria mahasiswa keterbatasan ekonomi yang dicantumkan pada pedoman Bidikmisi yaitu:

- 1) Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau
- 2) Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami istri) maksimal sebesar Rp3.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 setiap bulannya.

Implementasi dari kebijakan tersebut ditemukan suatu permasalahan yakni masih ditemukan beberapa mahasiswa baru yang dari segi ekonomi dianggap mampu namun menjadi penerima Bidikmisi, menurut Kabag Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Diponegoro, permasalahan tersebut masih sering dijumpai data administratif yang dinilai tidak relevan terkait berkas administratifnya. Seperti orangtua penerima

Bidikmisi menerima pendapatan dibawah Rp3.000.000,- namun memiliki mobil dan motor. Hal tersebut senada yang diungkapkan salah satu ketua Keluarga Mahasiswa Bidikmisi (Kamadiksi) UNDIP tahun 2016, bahwa beasiswa Bidikmisi hingga saat ini penyalurannya masih salah sasaran sehingga penerima bantuan pendidikan ini diterima oleh mahasiswa yang mampu, pencairan yang selalu datang terlambat sehingga berdampak pada biaya hidup mahasiswa terutama pada mahasiswa baru yang perlu adanya perhatian khusus.

Hasil evaluasi laporan tahunan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti juga menunjukkan kendala yang sama yaitu; penyaluran biaya Bidikmisi yang terlambat, pengawasan yang kurang dalam penyaluran sehingga membuat penerima Bidikmisi kurang tepat sasaran (Laporan Tahunan Dirjen Belmawa Tahun 2015) dan kurangnya koordinasi antar Perguruan Tinggi dan Kopertis wilayah untuk pelaksanaan penetapan mahasiswa penerima dana bantuan Bidikmisi (hasil wawancara pegawai Dirjen Belmawa Tahun 2017)

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai kendala yang terjadi pada program bantuan beasiswa Bidikmisi tersebut dengan lokus di Universitas Diponegoro untuk mengetahui *beneficiaries* program Bidikmisi tersebut.

1.2 Identifikasi, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

- 1) Pemberian beasiswa Bidikmisi belum sesuai sasaran
- 2) Penyaluran dana Bidikmisi terlambat diterimakan kepada mahasiswa

1.2.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan program Bidikmisi yang dijalankan di Undip dilihat dari kesesuaian *beneficiaries*
- 2) Apa kendala dalam pelaksanaan program Bidikmisi di Undip

1.2.3 Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis kesesuaian program bidikmisi di Undip dilihat dari *beneficiaries*
 - a. Menganalisis kesesuaian program dengan penerima bantuan,
 - b. Menganalisis kesesuaian program dengan kemampuan organisasi pelaksana,
 - c. Menganalisis kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.
- 2) Menganalisis Kendala Program Bidikmisi di Undip kendala dalam pelaksanaan program Bidikmisi di Undip.
 - a. Menganalisis kendala dalam mencapai ketepatan sasaran
 - b. Menganalisis kendala dalam mencapai ketepatan jumlah
 - c. Menganalisis kendala dalam ketepatan waktu

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan di bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya pada mata kuliah Pengantar Ilmu Sosial, Kebijakan publik, Implementasi Kebijakan, Analisis Kebijakan, Metodologi Penelitian.

2. Secara Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini disusun sebagai alat bantu peneliti untuk menyampaikan kepada khalayak bagaimana Kesesuaian Penerima Bidikmisi di Universitas Diponegoro. Selain itu penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan peneliti terhadap fenomena yang terjadi saat ini.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan agar kebijakan pendidikan tinggi yang telah diterapkan kedepannya dapat mengatasi tantangan yang akan dihadapi

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkaya informasi mengenai bantuan dana pendidikan pada akses pendidikan tinggi. Agar masyarakat dalam kategori tidak mampu secara ekonomi dapat mengakses jenjang pendidikan tinggi

1.4 Kajian Pustaka

1.4.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang analisis kesesuaian beneficiaries pada program bidikmisi di Universitas Diponegoro tidak lepas dengan melihat penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu terkait perbedaan cara pengelolaan bidikmisi yang dilakukan oleh Universitas Negeri Semarang dan Universitas Diponegoro. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati menggunakan metode *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Penelitian ini membahas mengenai perbedaan pengelolaan Bidikmisi yang terjadi pada Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian ini bahwa perbedaan jumlah kuota Bidikmisi antara Universitas Negeri Semarang dan Universitas Diponegoro disebabkan karena mahasiswa dengan kondisi perekonomiannya kurang mampu lebih banyak di Universitas Negeri Semarang, dan secara sistem pengelolaan Bidikmisi di Universitas Diponegoro kurang terorganisir dengan baik hal ini terlihat adanya tumpang tindih tupoksi Tim Pengelola Beasiswa Bidikmisi masih menjadi satu dengan pelaksanaan program, penelitian yang sama dilakukan oleh Risno H. Pardede penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Bidikmisi di Universitas Riau Tahun 2010-

2014, Kebijakan bantuan beasiswa Bidik Misi di Universitas Riau tahun 2010-2014 mengalami banyak permasalahan baik dari segi sosialisasi, rekrutmen beasiswa Bidikmisi, hasil studi mahasiswa Bidikmisi hingga prinsip-prinsip 3T (Tepat sasaran, Tepat Waktu, dan Tepat Guna) yang tidak sesuai dengan harapan program beasiswa Bidikmisi.

Penelitian yang serupa diteliti oleh Agung Baskoro S.B, penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Program Bidikmisi di Universitas Yogyakarta, pada penelitian ini menyimpulkan bahwa terselenggaranya program Bidikmisi memberikan kesempatan bagi masyarakat luas dengan keterbatasan ekonomi salah satunya adalah UNY, Perguruan Tinggi ini ditunjukkan dengan tercapainya pemerataan terhadap akses pendidikan tinggi telah tercapai, responsivitas mahasiswa untuk mengenyam pendidikan secara tepat waktu sejumlah 73,20 persen atau sekitar 366 mahasiswa berhasil lulus tepat waktu dengan adanya program Bidikmisi, dan komitmen penuh antara penyelenggara dan pengelola Bidikmisi memberdayakan mahasiswa sehingga mendorong mahasiswa untuk berprestasi dan semangat berkompetisi hal ini dibuktikan dengan mahasiswa dengan IPK 3,5 sejumlah 50,45 persen, dan IPK 3,01-3,5 sejumlah 47,55 persen. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dibuat matriks kajian sebagai berikut:

No.	Judul, Penulis, Tahun	Objek Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi Tahun 2010-2014 (Studi Penelitian di Undip dan Unnes) Rahmawati, 2016	Mahasiswa Bidikmisi Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang Pengelola beasiswa Bidikmisi UNDIP dan UNNES Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif, kualitatif	Pelaksanaan beasiswa Bidikmisi di UNDIP masih kurang terorganisir dengan baik dan tumpang tindih tupoksi
2	Evaluasi Kebijakan Bidikmisi di Universitas Riau Tahun 2010-2014 Risno H. Pardede, 2015	Mahasiswa Universitas Riau (UR) Forum Mahasiswa Bidikmisi (Formadiksi) Badan Pengelola Beasiswa UR	Penulis tidak mencantumkan metode penelitian	Bantuan ini belum mencakup keseluruhan mahasiswa yang tidak mampu, dan kecurangan dalam administrasi data penerima
3	Efektifitas Program Bidikmisi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Agung Baskoro SB, 2016	Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Badan Pengelola	Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif, kualitatif	Efektifitas Program Bidikmisi di Universitas Negeri Yogyakarta dinilai tercapai, hal ini dapat dilihat dari

		beasiswa UNY		pemerataan akses pendidikan, lulus tepat waktu, meningkatnya prestasi mahasiswa, dan didukung SDM yang berkualitas
--	--	-----------------	--	--

1.4.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2013: 7), administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Administrasi publik menyangkut penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar, dan untuk kepentingan publik. Hal serupa diungkapkan juga oleh Stillman II (dalam Keban, 2004:5), yaitu definisi administrasi negara sangat bervariasi bahkan sulit disepakati.

Variasi ini dapat dilihat dari beberapa pendapat sebagai berikut:

- 1) Menurut Dimock, Dinmock, & Fox, administrasi publik merupakan produksi barang-barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi tersebut melihat administrasi publik sebagai suatu kegiatan ekonomi, atau serupa *business* tetapi khusus dalam menghasilkan barang dan pelayanan publik.

- 2) Barton & Chapel, melihat administrasi publik sebagai “*the work of government*” atau pekerjaan yang dilakukan pemerintah. Definisi ini menekankan aspek keterlibatan personel dalam memberikan pelayanan kepada public.
- 3) Starling melihat administrasi publik sebagai semua yang dicapai pemerintah, atau dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Dengan kata lain batasan tersebut menekankan aspek “*the accomplishing side of government*” dan seleksi kebijakan public.
- 4) Nigro & Nigro administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu permasalahan yang mencakup tiga cabang, yakni yudikatif, legislatif, dan eksekutif.
- 5) Rosenbloom menunjukkan bahwa administrasi public merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses management, politik, dan hukum untuk memenuhi pemerintah di bidang legislatif , eksekutif, dan yudikatif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Definisi ini menekankan aspek proses institusional atau kombinasi ketiga jenis kegiatan pemerintah-eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
- 6) Menurut Nicholas Henry bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan agar lebih terhadap kebutuhan.

Perkembangan ilmu administrasi Publik publik dapat dilihat dari perkembangan Paradigma Administrasi Publik sebagai berikut:

1) *Old Public Administration*

Gagasan dasar dari pandangan ini ada dua yaitu 1) pemisahan antara politik dan administrasi, dan 2) pentingnya efisiensi. Denhart & Denhart (6 : 2007) “*two key themes that served as a focus for the study of public administration for the next half century or more. First, there was the distinction between politics (or policy) and administration. Second, there was concern for creating structures and strategies of administrative management that would permit public organizations and their managers to act in the most efficient way possible.*” Pemisahan ini memberi ruang kepada politisi untuk merumuskan kebijakan sedangkan para administrator bekerja lebih efisien dalam implementasi kebijakan.

2) *New Public Management*

Pada konsep ini, pimpinan didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Konsep *New Publik Management* dapat dipandang sebagai suatu konsep yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah yang tidak efisien.

In the New Public Management, public managers are challenged either to find new and innovative ways to achieve results or to privatize functions previously provided by government. They are urged to “steer, not row,” meaning they should not assume the

burden of service delivery themselves, but, wherever possible, should define programs that others would then carry out, through contracting or other such arrangements. The key is that the New Public Management relies heavily on market mechanisms to guide public programs. (Denhart & Denhart, 13 : 2007)

Untuk lebih mewujudkan konsep *New Public Management* dalam birokrasi publik, maka diupayakan agar para pemimpin birokrasi meningkatkan produktivitas dan menemukan alternatif atau cara-cara pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Mereka didorong untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi, lembaga birokrasi publik, merumuskan kembali misi organisasi, dan prosedur birokrasi, dan melakukan desentralisasi proses penegembalian kebijakan.

Pada paradigma ini, masyarakat dipandang sebagai pelanggan, atau *customer* bukan sebagai sesuatu yang harus dilayani. Orientasinya jelas yaitu untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam pengelolaan organisasi.

3) *New Public Service*

Paradigma ini lahir atas kritik kedua kata pemerintahan acap kali digunakan merujuk pada struktur dan institusi pemerintahan. Adapun *governance* cenderung diartikan menjadi bagaimana otoritas publik dilibatkan, bagaimana warga negara diberi suara, serta bagaimana kebijakan dibuat berdasarkan pada isu-isu yang menjadi konsentrasi dari publik.

Jika pada paradigma *Old Public Administration* (OPA) mengedepankan sisi politik, paradigma *New Public Management* (NPM) mengedepankan sisi ekonomi,

maka paradigma *New Public Service* mengedepankan pada sisi demokrasi. Masyarakat, tidak dilihat sebagai sesuatu yang harus dikuasai secara politis, atau dilihat sebagai konsumen yang harus dilayani berdasar kemampuan ekonominya. Namun, masyarakat dilihat sebagai *citizenship*, yaitu sebagai masyarakat yang harus dilayani tanpa harus dibedakan.

Dasar teori NPS adalah tentang *Citizenship*, Komunitas, *Civil Society* dan organisasi yang berkemanusiaan. Seperti yang dikatakan oleh Denhart & Denhart (44 : 2007) *Theorists of citizenship, community and civil society, organizational humanism and the new public administration, and postmodernism have helped to establish a climate in which it makes sense today to talk about a New Public Service. Though we acknowledge that differences, even substantial differences, exist in these various viewpoints, we would suggest there are also similarities that distinguish the cluster of ideas we call the New Public Service from those associated with the New Public Management and the Old Public Administration.*

New Public Service memandang publik sebagai 'citizen' atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama. Tidak hanya sebagai customer yang dilihat dari kemampuannya membeli atau membayar produk atau jasa. Citizen adalah penerima dan pengguna pelayanan publik yang disediakan pemerintah dan sekaligus juga subyek dari berbagai kewajiban publik seperti mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, membela Negara, dan sebagainya.

4) Good Governance

Secara istilah, pengertian *Good Governance* dapat ditinjau dari dua segi yang berbeda, yaitu *good government governance* dan *good corporate governance* dilihat dari sudut pandang korporasi atau perusahaan swasta. Dari segi *functional aspect* : *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau sebaliknya. World Bank memberikan definisi “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”, yakni kekuasaan suatu Negara untuk menjalankan fungsi pengelolaan ekonomi dan sosial dalam pemberdayaan masyarakat sedangkan

Adapun karakteristik *good governance* dari UNDP (dalam Sedarmayanti, 2012: 5-6) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

- a) *Participation* yaitu bahwa semua orang harus diberi kesempatan untuk bersuara dalam pengambilan keputusan baik langsung atau melalui institusi perantara yang mewakili kepentingannya.
- b) *Rule of Law* yaitu bahwa aturan hukum harus adil dan ditegakan tanpa pandang bulu, termasuk hukum yang mengatur hak-hak asasi manusia.
- c) *Transparency* yaitu bahwa keterbukaan harus dibangun diatas aliran informasi yang bebas. Berbagai proses, institusi dan informasi harus dapat diakses oleh semua orang yang berkepentingan.

- d) *Responsiveness* yaitu bahwa institusi-institusi dan proses yang ada harus diarahkan untuk melayani para pemangku kepentingan atau *stakeholders*.
- e) *Consensus orientation* yaitu bahwa harus ada proses mediasi untuk sampai pada consensus umum yang didasarkan atas kepentingan kelompok, dan sedapat mungkin didasarkan pada kebijakan dan prosedur.
- f) *Equity* yaitu bahwa semua orang (baik laki-laki maupun wanita) memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraannya.
- g) *Effectiveness and efficiency* yaitu bahwa proses dan institusi-institusi yang ada sedapat mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan terbaik terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada.
- h) *Accountability* yaitu bahwa para pengambil keputusan di instansi pemerintah, sektor public dan organisasi masyarakat madani harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan diputuskannya kepada publik sekaligus kepada para pemangku kepentingan.
- i) *Strategic vision* yaitu bahwa para pemimpin dan masyarakat publik harus memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang terhadap pembangunan manusia, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kompleksitas sosial dan budaya.

Aktor dalam Governance

Aktor-aktor good governance menurut Sedarmayanti (2009: 280) antara lain:

(1) Negara/pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting sehingga dapat dihindari.

(2) Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal.

(3) Masyarakat: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.

1.4.3 Definisi Kebijakan Publik

Donald F. Kettl (dalam Nugroho, 2003) mengemukakan bahwa memasuki millennium ketiga, administrasi publik menghadapi empat isu kritis, pertama, struktur, yang berkenaan dengan tantangan menguatnya swasta dan menyusutnya pemerintahan (*best government is least government*). Kedua berkenaan dengan proses administrasi publik, yaitu yang memperhadapkan kenyataan bahwa sumber defisit terbesar di setiap Negara adalah proses penyelenggaraan administrasi publik. Ketiga tentang nilai, yang antara

lain berkenaan munculnya ikon *enterpreneurial government*. Keempat kapasitas, yaitu yang berkenaan dengan isu kecakapan dari administrasi publik memanejemeni urusan-urusan publik.

William Dunn (dalam Abidin, 2006) mengaitkan kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu dia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai “ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai sehari-hari.” Disini dia melihat ilmu kebijakan sebagai perkembangan lebih lanjut dari ilmu yang sudah ada. Metodologi yang digunakan bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang kompleks dan tidak memungkinkan pemisahan satu aspek dengan aspek lain.

Gambar 1.3

Alur Kebijakan Publik



Sumber: Riant Nugroho (2003:51)

Dari gambar diatas bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan), maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai “tempat” tujuan tersebut.

Dari sini kita bias meletakkan “kebijakan publik” sebagai “manajemen pencapaian tujuan nasional”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa:

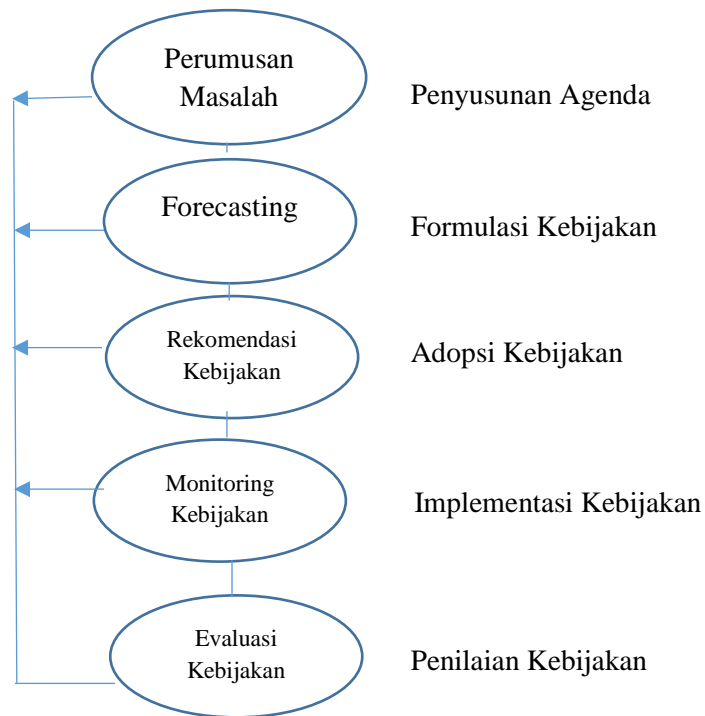
- 1) Kebijakan publik mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah “hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.”
- 2) Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Namun bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut faktor publik. Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah yang lebih bersifat intelektual.

Berikut adalah gambar mengenai proses kebijakan publik:

Gambar 1.4

Proses Kebijakan Publik



Sumber: Subarsono (2005: 9)

1.4.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan *derrivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut

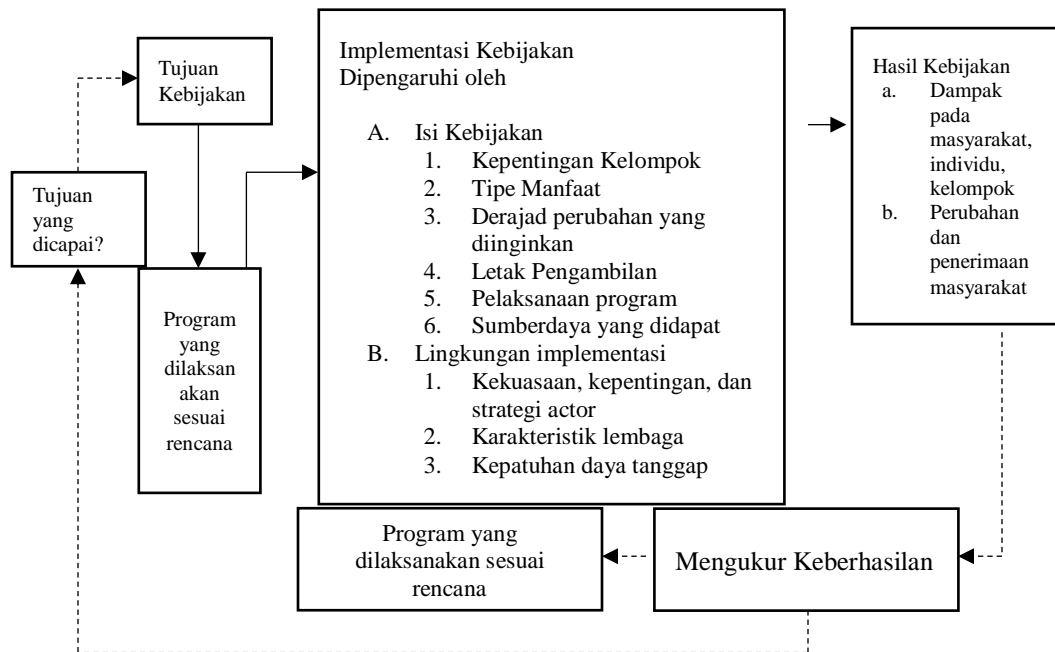
1) Model Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2005), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi

kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) seperti pada gambar 1.5 Variable isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan, (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku sasaran relative lebih sulit diimplementasikan, (4) apakah letak sebuah program tepat, (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya secara rinci, dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Gambar 1.5

Model Marilee S. Grindle



Sumber: Subarsono (2005: 94)

Salah satu model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Implementasi Kebijakan dari teori Grindle. Penulis menggunakan model ini untuk membandingkan hasil di lapangan dengan isi kebijakan.

Fenomena isi kebijakan Teori Grindle meliputi enam hal, yaitu:

1. Kepentingan kelompok sasaran

Kepentingan kelompok sasaran, ini adalah salah satu variabel yang harus diperhatikan dalam sebuah program kebijakan.

2. Manfaat yang diterima

Hal ini terkait dengan kelompok sasaran, dengan adanya kejelasan kepentingan kelompok sasaran maka akan dapat terwujud kemanfaatan yang optimal yang dapat diterima dan dirasakan oleh kelompok sasaran.

3. Perubahan yang diinginkan

Setiap program yang dilaksanakan tentu saja bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kondisi menjadi kondisi yang lebih baik dan dapat menguntungkan semua pihak, yaitu pemerintah sebagai implementor dan juga masyarakat sebagai kelompok sasaran.

4. Ketepatan program

Program yang dilaksanakan dapat tepat sasaran kepada mereka yang layak untuk menjadi sasaran dari program yang ada.

5. Kejelasan implementor

Implementor adalah mereka yang melaksanakan atau pelaku dari implementasi suatu program. Dengan adanya kejelasan implementor akan memperlancar pelaksanaan program yang ada.

6. SDM yang memadai

Implementor yang melaksanakan program seharusnya memenuhi standar kualitas yang baik. Memadai dalam hal ini adalah memadai dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga SDM yang ada mencukupi bagi pelaksanaan program yang dibuat.

Sementara lingkungan implementasi meliputi tiga hal, antara lain:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi implementasi

Kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki dari sebuah implementasi yang ada diharapkan mampu mewujudkan kehendak dan harapan rakyat. Strategi implementasi akan dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan yang sedang dilaksanakan.

2. Karakteristik rezim yang berkuasa

Ini akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apabila rezim yang berkuasa mengedepankan kepentingan rakyat maka kesejahteraan akan dapat mudah terwujud.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

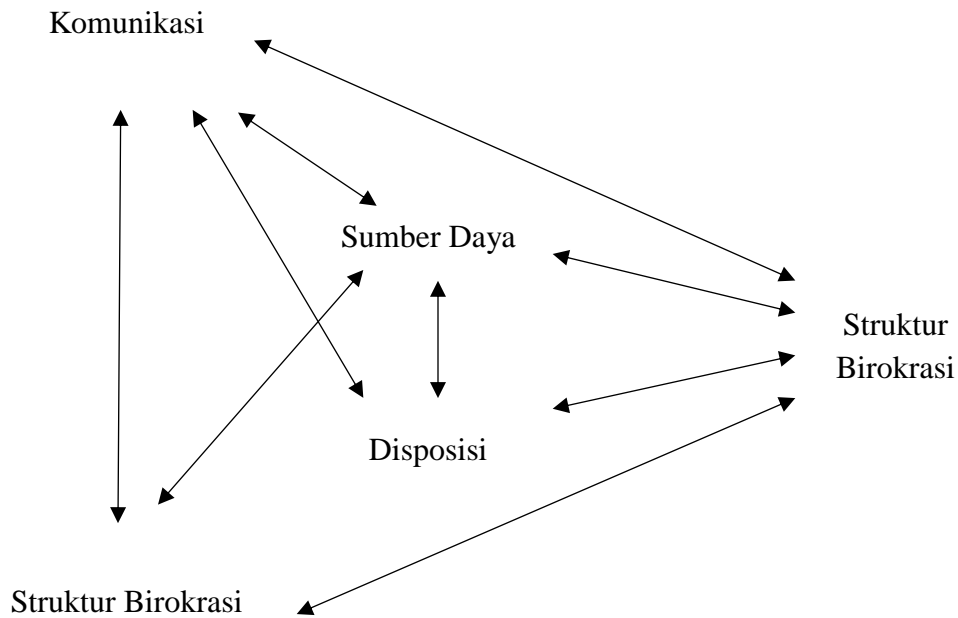
Kelompok sasaran diharapkan berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dari pemerintah. Pada dasarnya program yang dilakukan adalah demi kepentingan rakyat, sehingga rakyat disini diharapkan dapat seiring sejalan dengan pemerintah.

2) **Model George C. Edwards III**

Dalam pandangan Edwards III (Subarsono, 2005: 90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Gambar 1.6

Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III



Sumber: Edwards III dalam Subarsono 2005: 91

1) Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sedangkan pengertian komunikasi itu sendiri merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan

peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Terdapat tiga indikator yang dipakai dalam mengatur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan,
- b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan maka petunjuk-petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas,
- c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Menurut Edward dengan menyelidiki hubungan antara komunikasi dan implementasi maka dapat digeneralisasikan bahwa semakin cepat keputusan-keputusan yang diteruskan kepada mereka yang melaksanakan maka semakin tinggi pula probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah tersebut dilaksanakan.

2) Sumber Daya

Variabel atau faktor kedua yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia (SDM), dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif. Sumber daya ini mencakup SDM, anggaran, fasilitas.

a) Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, implementasi kebijakan akan berjalan lambat,

b) Anggaran

Anggaran diatas berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c) Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang

layak, seperti gedung, tanah, dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Dapat ditarik kesimpulan mengenai hubungan sumber daya dengan implementasi bahwa sumber daya menjadi sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edwards adalah:

a) Peningkatan birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

b) Intensif

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memampukan intensif

4) Struktur Birokrasi

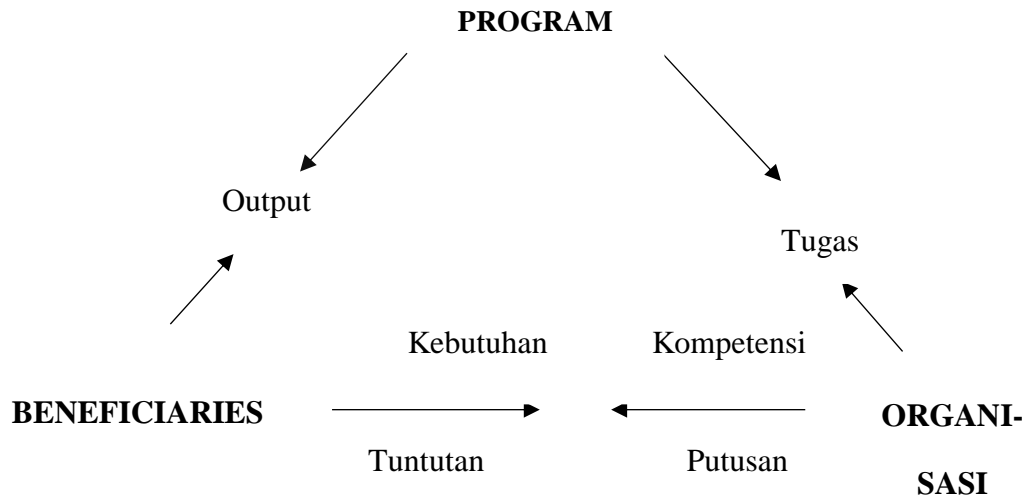
Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu, mekanisme, dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

3) Model David C. Korten.

Model ini menekankan pada keberhasilan program, bahwa program akan mencapai tujuan jika terdapat keterkaitan tiga unsur yakni: kesesuaian program dengan bebeneficiaris, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.7

Model Teori David C. Korten



Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan manfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok pemanfaat program.

Model utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis kesesuaian program oleh David C. Korten. Penulis menggunakan model ini untuk

mengetahui suatu keberhasilan kebijakan dengan melihat tiga variabel kesesuaian program bantuan beasiswa bidikmisi di Undip. Sedangkan untuk mendeskripsikan implementasi dari kebijakan program bidikmisi di Undip, peneliti menggunakan teori implementasi program oleh Marilee S. Grindle dengan melihat dari *content of policy* dan *context of policy*.

1.4.5 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 96 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Bidikmisi

Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik namun memiliki keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan jenjang menuju pendidikan tinggi. Penentuan kelolosan Bidikmisi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang sekarang menjadi Kementerian Riset, Pendidikan, dan Teknologi.

a) Program Bidikmisi

Bidikmisi adalah singkatan dari Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi, dikhususkan untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki prestasi yang baik. Program ini merupakan program seratus hari kerja Menteri Pendidikan Nasional yang dicanangkan tahun 2010 hingga diteruskan sampai saat ini. Agar program tersebut tercapai diterapkannya prinsip 3T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu.

b) Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Bidikmisi

1) Misi

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi namun mempunyai potensi akademik baik bagi untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi;
2. Memberikan akses bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk menjadi sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, cinta tanah air, dan semangat bela Negara;
3. Memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk ikut berperan serta dalam meningkatkan daya saing bangsa di era kompetisi global, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diratifikasi oleh seluruh negara ASEAN.

2) Tujuan

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
2. Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat waktu;
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;

4. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetif;
5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian social sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

3) Sasaran

Sasaran program adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat tahun 2015 dan 2016 yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik.

c) Pengelolaan Bidikmisi

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Bidikmisi, masing-masing pengelola program (Tim Pengelola Pusat dan Tim Pengelola Perguruan Tinggi) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Hal-hal yang dilaporkan oleh pengelola program adalah yang berkaitan dengan data/statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring dan pengaduan masalah.

A. Tim Pengelola Pusat harus membuat laporan-laporan sebagai berikut:

1. Laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi;
2. Laporan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi;
3. Statistik penerima bantuan yang disusun berdasarkan data yang diterima dari Tim Pengelola PT;

4. Hasil monitoring dan evaluasi yang berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi;
5. Kegiatan lainnya, seperti diseminasi, pelatihan, dll.

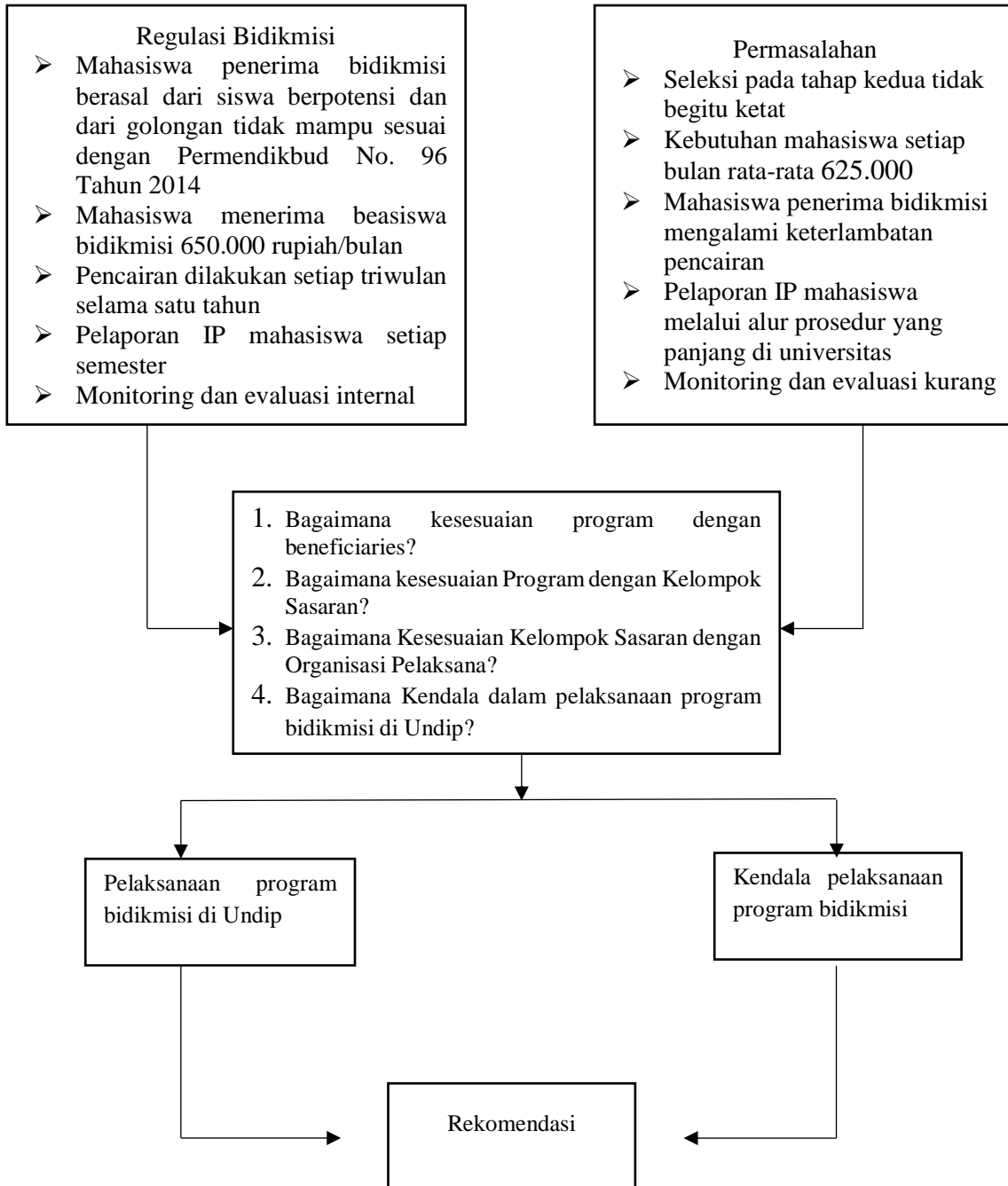
Laporan akhir tahun diserahkan Dirjen Belmawa Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

B. Tim Pengelola Perguruan Tinggi

Tim pengelola perguruan tinggi harus membuat laporan-laporan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi penyerapan dana Bidikmisi (Baru dan on going);
2. Laporan penetapan penerima Bidikmisis melalui SIM Bidikmisi;
3. Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi melalui <http://simb3pm.dikti.go.id>;
4. Laporan pengganti penerima Bidikmisi;
5. Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, pendidikan karakter,dll.

1.5 Kerangka Pikir Peneliti



1.6 Fenomena Penelitian

1) Analisis kesesuaian beneficiaries program Bidikmisi Undip dilihat dari beberapa indikasi sesuai teori Korten yang mengatakan bahwa keberhasilan sebuah program ditentukan 3 elemen yaitu

- a. Kesesuaian antara program dengan manfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
- b. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
- c. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Keith F. Punch (dalam Nugroho, 2014: 28) mengelompokkan penelitian menjadi:

1. Penelitian kuantitatif
2. Penelitian kualitatif
3. Penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif

Pada penelitian ini, digunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dari ciri yang demikian memungkinkan studi ini dapat amat mendalam dan demikian bahwa kedalaman data yang menjadi pertimbangan dalam penelitian model ini (Bungin, 2008: 68)

1.7.2 Lokus Penelitian

Lokus penelitian ini dilaksanakan di Universitas Diponegoro (Undip). Alasan memilih Undip karena Undip merupakan Perguruan Tinggi Negeri terbesar di Jawa Tengah yang menyelenggarakan program Bidikmisi dengan jumlah mahasiswa penerima terbesar.

1.7.3 Subjek Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah seluruh aktor kebijakan dan *stakeholders* yang terkait dalam implementasi kebijakan Bidikmisi di Universitas Diponegoro. Data tersebut dapat berupa pernyataan keterangan maupun data-data yang dapat membantu peneliti untuk memahami permasalahan penelitian. Subjek penelitian tersebut yaitu:

- 1) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti
- 2) Wakil Rektor 1 Undip
- 3) Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Mahasiswa Undip.
- 4) Direktorat Bidang Kemahasiswaan Undip

- 5) Ketua Keluarga Mahasiswa Bidikmisi Universitas Diponegoro
(Kamadiksi Undip).
- 6) Mahasiswa Penerima Bidikmisi dengan mengambil perwakilan dari setiap
Fakultas

1.7.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat bukan numerik atau bukan angka-angka melainkan kata, pernyataan, atau kalimat-kalimat.

1.7.5 Sumber Data

Menurut Lofland dan lofland (dalam Nugroho, 2014: 115), sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan, seperti dokumen dan lain-lain, termasuk diantaranya sumber data tertulis, dokumen rekaman suara dan foto, dan data statistik. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data Primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari lapangan atau objek penelitian secara langsung. Data tersebut berasal dari jawaban daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada informan mengenai peran aktor dalam proses implementasi kebijakan Bidikmisi.

2. Data sekunder

Data sekunder ini disusun dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini berupa:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2014 Penyelenggaraan Bantuan Biaya Bidikmisi
3. PP Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Laporan Tahunan Belmawa Tahun 2017.
5. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2017.

1.7.6 Analisis Data

Miles dan Huberman (Herdiansyah 2010:164) berpendapat didalam pengujian data, bahwa ada empat alur kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan temuan apa yang dijumpai selama penelitian yang merupakan bahwa rencana

pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Data yang dimaksudkan adalah data yang berhubungan dengan penyelenggaraan program beasiswa bidikmisi di Undip.

2. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses, dimana peneliti melakukan pemilihan serta pemusatan pada penyederhanaan data hasil penelitian. Proses ini juga dinamakan sebagai proses transformasi data, yaitu perubahan dari data yang bersifat “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan menjadi data yang siap pakai. Catatan-catatan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali.

3. Penyajian Data

Penyajian data ini dilakukan dengan menyusun dari berbagai informasi mengenai penyelenggaraan program bidikmisi di Undip dan kaitannya dalam meningkatkan prestasi mahasiswa. Dengan demikian laporan dari lapangan tentang data yang detail akan mudah digunakan. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi serta mempermudah peneliti dalam melihat keseluruhan hasil penelitian

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan ini menyangkut interpretasi peneliti, yaitu penggambaran makna dari data yang ditampilkan. Peneliti berupaya mencari makna dibalik data yang dihasilkan dalam penelitian serta menganalisis data kemudian membuat kesimpulan. Data-data yang sudah direduksi dan disajikan

dalam susunan yang sistematis tersebut kemudian dianalisa guna menghasilkan sebuah kesesuaian beneficiaries program bidikmisi di Undip.

1.7.7 Kualitas Data

Kualitas data adalah hal yang terpenting dalam penelitian kualitatif, karena kualitas data menentukan kualitas sebuah penelitian. Kualitas data membutuhkan pengujian data didalamnya.

Validitas dan reabilitas data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan beberapa cara salah satunya adalah dengan triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode Triangulasi yang dapat diartikan bahwa proses penarikan uji kesubjektifan bukti-bukti untuk menentukan apakah bukti tersebut dapat diolah secara logis dan konseptual sehingga menjadi hasil akhir untuk setiap kaitan rangkaian.

Agustianova (2015: 47-49) mengemukakan empat macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari berbagai sumber tersebut, nantinya dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber-sumber itu, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif.

2. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang peneliti dalam melakukan pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi diatas adalah penggunaan sejumlah perspektif atau teorru dalam menafsir seperangkat data. Dalam membahas suatu permasalahan yang sedang di kaji, hendaknya peneliti tidak menggunakan suatu perspektif teori sehingga nantinya di dukung dari multiple theory. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang diperoleh.

4. Triangulasi Metode

Triangulasi metode ialah mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi.

Pada penelitian ini validitas data menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode. Peneliti tidak melakukan wawancara kepada satu informan saja melainkan melakukan wawancara lagi kepada informan yang berbeda.

Kemudian peneliti mengkaji kebenaran suatu data yang didapatkan dari wawancara, dilakukan pengecekan dengan cara observasi dan dokumentasi.